



**LAPORAN KOORDINASI
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
2020**

BIRO HUMAS & TATA USAHA PIMPINAN

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 TUJUAN.....	3
1.2 SASARAN	4
1.3 RUANG LINGKUP	4
1.4 KELUARAN	4
1.5 METODOLOGI	5
1.5.1 Pengumpulan Informasi dan Data	5
1.5.2 Pengelolaan Informasi dan Data	5
1.5.3 Pelayanan Pemohon Informasi dan Data	6
1.5.4 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tamu.....	8
1.5.5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPID.....	9
1.5.6 Peningkatan Koordinasi dengan PIC PPID dan FKPPID.....	10
1.5.7 Partisipasi pada Kegiatan Bakohumas	11
1.5.8 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.....	11
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	13
2.1 Pelayanan Informasi Publik.....	13
2.2 Kunjungan Tamu.....	21
2.3 Badan Koordinasi Humas (BAKOHUMAS)	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Faktor Pendukung	30
3.2 Faktor Penghambat	31
BAB IV PENUTUP	32

Daftar Tabel

Tabel 1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020	12
Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020.....	18
Tabel 3. Kunjungan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020	23
Tabel 4. Kunjungan Tamu Negara Asing Tahun 2020	27
Tabel 5. Kunjungan Tamu Akademisi/Universitas Tahun 2020	27
Tabel 6. Kunjungan Tamu Antar Lembaga Tahun 2020	28
Tabel 7. Pertemuan Bakohumas yang Dihadiri selama Tahun 2020	29

Daftar Grafik

Grafik 1. Jumlah Pemohon Informasi per Bulan Tahun 2020.....	13
Grafik 2. Mekanisme Permohonan Informasi per Bulan Tahun 2020	14
Grafik 3. Jenis Informasi Yang Diminta per Bulan Tahun 2020.....	15
Grafik 4. Pelayanan Permohonan per Bulan Tahun 2020	16
Grafik 5. Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Tahun 2020	17
Grafik 6. Rekapitulasi Kunjungan Tamu selama Tahun 2020	21
Grafik 7. Kunjungan Tamu berdasarkan Jumlah per Bulan Tahun 2020.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu bagian penting dalam reformasi birokrasi, dan terwujudnya masyarakat informasi. Adanya keterbukaan Informasi Publik menjamin Hak untuk Tahu masyarakat, dan sekaligus bentuk kontrol terhadap Badan Publik dari Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelayanan Informasi Publik telah dijamin dan diwujudkan Pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pengesahan UU KIP merupakan bentuk penegasan bahwa hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Keberadaan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 semakin menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan *good governance* yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 sekaligus memenuhi hak untuk tahu masyarakat.

Secara garis besar UU KIP yang terdiri dari 64 pasal ini mencakup 4 (empat) hal utama, yaitu: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, cepat, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas; serta (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Sebagaimana peraturan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, setiap Badan Publik wajib memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan peran dan fungsinya.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tanggung

jawab sebagai penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini menunjukkan Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sentral dalam proses penyusunan rencana dan anggaran pembangunan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, hingga evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana pembangunan.

Oleh karena itu, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang tidak termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan, sudah seharusnya disosialisasikan kepada publik sebagai wujud transparansi informasi. Kementerian PPN/Bappenas harus membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses informasi yang menjadi hak masyarakat luas. Kementerian PPN/Bappenas juga harus siap melayani dengan baik setiap permintaan informasi dari publik. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka UU KIP mengatur sanksi pidananya.

Sebagai kelanjutan dari Kegiatan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan tahun 2015, serta telah disusunnya SK Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Data (FKPPID) seluruh Kementerian/Lembaga, maka menjadi sangat penting untuk dijadikan kegiatan tersendiri bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik yang merupakan amanat UU KIP, yang kemudian menjadi tupoksi PPID di Kementerian PPN/Bappenas dan masuk dalam salah satu tupoksi Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.

Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas hingga di tahun 2020, merasa perlu melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID Kementerian PPN/Bappenas, antara lain dengan melakukan penyusunan *database* pengelolaan informasi dan dokumentasi, peningkatan koordinasi dengan *Person In Charge* (PIC) PPID di Unit Kerja Eselon (UKE) II, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan informasi

publik, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengayaan konten di situs PPID Kementerian PPN/Bappenas.

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan dalam pelayanan informasi publik Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana yang tertuang dalam *Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020*, dimana target untuk area peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2020 adalah:

- a. Penguatan Standar Pelayanan
 - Saluran Komunikasi Whatsapp PPID dan Kunjungan
- b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima.
- c. Pengelolaan Pengaduan.
- d. Penguatan Sistem Informasi PPID
 - Penyempurnaan website PPID Kementerian PPN/Bappenas.
 - Merancang database PPID Kementerian PPN/Bappenas.
 - Penguatan hubungan kelembagaan FKPPID.
- e. Pengukuran Dampak dan Perubahan
 - Survei kepuasan pelayanan publik terhadap *stakeholders*.

Selain itu, adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 mengharuskan Kementerian PPN/Bappenas melakukan penyesuaian dan antisipasi sarana dan fasilitas layanan kunjungan dan permohonan informasi secara daring. Saluran komunikasi menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mewujudkan komunikasi antara pejabat pengelola dengan pemohon informasi dan kunjungan Kementerian PPN/Bappenas.

1.1 TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengendalikan seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam koridor yang sistematis dan efektif, serta mendorong implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.

1.2 SASARAN

Sasaran kegiatan, yaitu terkendalinya seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang sistematis dan efektif. Indikator yang menunjukkan keberhasilan kegiatan ini, antara lain:

- a. Bulan efektif pengelolaan informasi dan dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu 12 (dua belas) bulan.
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu dengan predikat baik.

1.3 RUANG LINGKUP

Kegiatan ini memiliki ruang lingkup, yaitu:

- a. Pengumpulan informasi dan data.
- b. Pengelolaan informasi dan data.
- c. Pelayanan pemohon informasi dan data.
- d. Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tamu.
- e. Monitoring dan Evaluasi kegiatan PPID.
- f. Peningkatan Koordinasi dengan PIC PPID dan FKPPID.
- g. Partisipasi pada Kegiatan Bakohumas.
- h. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

1.4 KELUARAN

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Terselenggaranya pengumpulan informasi dan data yang baik.
- b. Terciptanya pengelolaan dan pelayanan informasi dan data yang baik.
- c. Tersusunnya standar pelayanan informasi publik yang baik.
- d. Terjalannya koordinasi yang efektif dengan pihak internal dan eksternal.
- e. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik.

1.5 METODOLOGI

1.5.1 Pengumpulan Informasi dan Data

Informasi dan data yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, yang dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis. Pada tahun 2020, Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan melakukan pengumpulan informasi dan data dari UKE II, sebagaimana yang diminta oleh pemohon informasi, melalui permohonan via telepon atau melalui Nota Dinas yang ditandatangani Pejabat Eselon II.

1.5.2 Pengelolaan Informasi dan Data

Informasi dan data yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan UU KIP, meliputi:

- a. **Informasi dan data yang wajib disediakan secara berkala.** Untuk subjek informasi ini, Kementerian PPN/Bappenas menyediakan informasi dan data terkait Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Program Kerja, RPJPN, RPJMN, dan RKP.
- b. **Informasi dan data yang wajib diumumkan secara serta merta.** Untuk subjek informasi ini, Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki informasi yang dimaksud.
- c. **Informasi dan data yang wajib tersedia setiap saat.** Untuk subjek informasi ini, Kementerian PPN/Bappenas menyediakan informasi dan data terkait Daftar Informasi Publik (DIP), peraturan perundang-undangan, prosedur perizinan, keputusan, kebijakan, DIPA, RKA K/L, serta hasil penelitian dan kajian.
- d. **Informasi dan data yang dikecualikan.** Untuk subjek informasi ini, Kementerian PPN/Bappenas telah menyediakan menyediakan daftar informasi dan data yang dikecualikan. Pengecualian informasi publik ini dibuktikan melalui berita acara uji konsekuensi yang dilakukan

PPID Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 UU KIP.

1.5.3 Pelayanan Pemohon Informasi dan Data

Untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan informasi Kementerian PPN/Bappenas, pemohon wajib:

- a. Mengisi formulir permintaan informasi, yang dapat dilakukan di tempat pelayanan, atau surat permohonan dapat dikirimkan via pos ke alamat:

*Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
Gedung Wisma Bakrie 2, Lantai 2
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi
Jakarta Selatan 12920
Telp./Faks. (021) 31934283*

Sebagai persyaratan untuk pemohon informasi yang datang langsung, wajib menunjukkan bukti identitas KTP/SIM/Paspor bagi perorangan, atau Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan Publik.

- b. Mengisi formulir pengaduan dan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di depan ruangan Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Menyampaikan formulir permintaan informasi atau pengaduan melalui *website* PPID yaitu pada laman (www.ppid.bappenas.go.id) atau e-mail (ppid@bappenas.go.id) dan WhatsApp di nomor 081211002143.
- d. Menyampaikan permintaan informasi melalui telepon.

Selanjutnya, Unit Pelayanan Informasi yang terdiri dari Tim Sekretariat Pelayanan Informasi Publik akan memilah permintaan informasi dan pengaduan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon yang datang langsung mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan;

- b. Pemohon melalui surat, faksimili, *website* dan e-mail mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan yang tersedia.
- c. Khusus untuk pemohon melalui telepon, data diri dapat diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik ke dalam Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan.

Kemudian, Unit Pelayanan Informasi akan menjawab permintaan informasi yang bersifat umum. Jika permintaan informasi bersifat khusus (informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat, atau belum termuat dalam DIP) maka Formulir Permintaan Informasi akan diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi Publik.

Tim Sekretariat berkoordinasi dengan PPID dan PIC PPID di UKE II terkait untuk memproses permintaan informasi. Proses ini melalui disposisi yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai kondisi. Apabila informasi sudah terkumpul, Tim Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepada pemohon.

Apabila pemohon informasi ingin melakukan pengaduan pelayanan informasi, akan diberikan formulir pengaduan. Setelah menerima dan pengisian formulir pengaduan, Tim Sekretariat akan meneruskan pengaduan ke PPID untuk ditindaklanjuti. Jika pengadu masih belum puas, maka dapat mengajukan pengaduan ke atasan PPID.

Biaya pelayanan informasi pada dasarnya dibebankan pada anggaran Kementerian PPN/Bappenas, sehingga pengguna informasi tidak dipungut biaya atau gratis. Namun bila terdapat kegiatan penggandaan informasi/bahan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi.

Produk pelayanan yang diberikan adalah berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk *hardcopy* (buku, majalah, brosur, dan hasil cetakan) sesuai dengan ketersediaan, dan *softcopy* (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Adapun sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang terdapat di Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, adalah: (1) Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman; (2) Ruang tunggu; (3) Produk pelayanan; (4) Komputer; (5) Meja dan kursi; (6) Rak informasi; (7) Telepon; (8) Faksimili; (9) Printer; dan (10) Televisi.

1.5.4 Fasilitas Penerimaan Kunjungan Tamu

a. **Kunjungan Tamu Dalam Negeri** (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi/Universitas Negeri/Swasta)

1. Tamu mengirimkan surat permohonan kunjungan/konsultasi kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk berkunjung ke Kementerian PPN/Bappenas melalui surat, faksimili dan email kunjungantamu@bappenas.go.id dan menghubungi saluran komunikasi resmi kunjungan tamu WhatsApp Kunjungan Tamu di 081211002142;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas akan mendisposisikan kepada Kedeputian yang terkait (untuk menyiapkan bahan paparan) sementara Biro Humas dan TU Pimpinan (memberikan dukungan);
3. Biro Humas dan TU Pimpinan akan berkoordinasi dengan kedeputian terkait dalam hal dukungan, seperti jadwal pelaksanaan, penyediaan ruangan, jamuan, cinderamata, dan lain-lain terkait kunjungan tersebut;
4. Pada saat yang sama, Biro Humas akan berkoordinasi dengan pihak yang akan mengadakan kunjungan.

b. **Kunjungan Tamu Luar Negeri** (Duta Besar, Lembaga Donor, dan sebagainya)

1. Perwakilan negara/organisasi yang bersangkutan mengirimkan surat permohonan untuk berkunjung ke Kementerian PPN/Bappenas;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas mendisposisikan penugasan penerimaan kepada kedeputian terkait, tembusan Biro Humas dan TU Pimpinan;
3. Biro Humas dan TU Pimpinan berkoordinasi dengan kedeputian terkait dalam hal dukungan, seperti jadwal pelaksanaan, penyediaan ruangan, jamuan, cinderamata, dan lain-lain terkait kunjungan;
4. Pada saat yang sama, Biro Humas dan TU Pimpinan akan berkoordinasi dengan pihak yang akan mengadakan kunjungan. Apabila diperlukan, Biro Humas dan TU Pimpinan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

1.5.5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPID

Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan guna menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan informasi publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2020, Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan melakukan rekapitulasi permohonan informasi publik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemohon informasi tahun 2020 lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, mekanisme yang dominan untuk memperoleh informasi adalah melalui jalur daring via surat elektronik PPID. Namun, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, termasuk tata letak dan tampilan ruangan Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas tetap perlu menjadi perhatian bersama.

1.5.6 Peningkatan Koordinasi dengan PIC PPID dan FKPPID

Forum Koordinasi PPID (FKPPID) yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui SK Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2015 (bulan April 2015) ini merupakan wadah koordinasi dan kerjasama Badan Publik dalam rangka pengembangan sumber daya antar anggota dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

FKPPID secara berkala mengadakan pertemuan dengan anggota FKPPID, yang salah satunya adalah PPID Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pertemuan FKPPID tersebut, dilakukan asistensi dan konsultasi hukum dalam penyelesaian sengketa informasi, serta fasilitasi PPID Kementerian/Lembaga dalam merencanakan dan mengimple-mentasikan kegiatan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab PPID yang ditentukan.

Selain dengan FKPPID, Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan juga merasa perlu meningkatkan koordinasi pengumpulan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan PIC PPID Kementerian PPN/Bappenas, yang merupakan perwakilan di setiap unit kerja level Eselon II. Oleh sebab itu, dalam menyikapi perkembangan era informasi dan digitalisasi saat ini, maka diperlukan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan mudah, cepat dan akurat yang dapat menyesuaikan dengan menjawab tantangan milenial 4.0.

Kegiatan koordinasi dengan PIC PPID untuk tahun anggaran 2020, diwujudkan dengan cara memudahkan proses pelayanan dalam menjawab tantangan milenial 4.0 bagi seluruh PIC Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas sebagai kepanjangan dari Sekretariat PPID bagi seluruh proses penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam koridor yang sistematis dan efektif, mendorong implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas

dapat terpenuhi, serta meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Diharapkan, setiap UKE II Kementerian PPN/Bappenas dapat memiliki format yang baku terkait informasi dan data apa saja yang perlu diberikan kepada publik, dan apa saja informasi dan data yang dikecualikan. Untuk ke depan, setiap PIC PPID Kementerian PPN/Bappenas memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola informasi dan data secara mandiri, sesuai dengan format yang telah ditentukan.

1.5.7 Partisipasi pada Kegiatan Bakohumas

- a. Bakohumas mengirimkan surat undangan kegiatan Bakohumas, yang diselenggarakan oleh Bakohumas atau K/L pusat dan/atau daerah, ditujukan kepada Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan kemudian mendisposisikan surat undangan kepada Kepala Bagian Humas.
- c. Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan, mengajukan permohonan SPPD apabila kegiatan Bakohumas berlangsung di luar kota.
- d. Kepala Bagian Humas menugaskan Staf Biro Humas yang menghadiri kegiatan Bakohumas menyiapkan laporan kegiatan.

1.5.8 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik selama tahun 2020 telah dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember 2020. Sebagai rincian, berikut tabel pelaksanaan pelayanan informasi publik selama kurun waktu tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

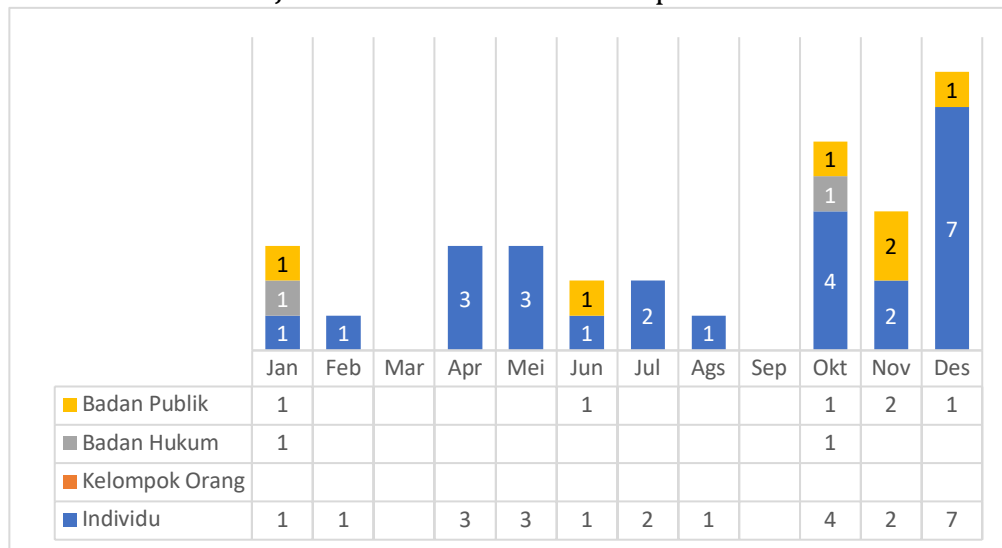
NO	KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelayanan Informasi Publik	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2.	Kunjungan Tamu	✓	✓	✓		✓	✓					✓	✓
3.	Badan Koordinasi Humas							✓	✓	✓	✓		✓

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelayanan Informasi Publik

Hingga Desember 2020, Sekretariat PPID Kementerian PPN/Bappenas telah melayani sebanyak 34 pemohon informasi publik baik dengan mekanisme datang langsung, melalui saluran komunikasi, via elektronik, maupun surat resmi, dengan rincian sebagai berikut: 26 pemohon dari kelompok individu, 3 pemohon dari Badan Hukum, dan 5 pemohon dari Badan Publik. Perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun ini tidak ada pemohon informasi publik yang berasal dari kelompok.

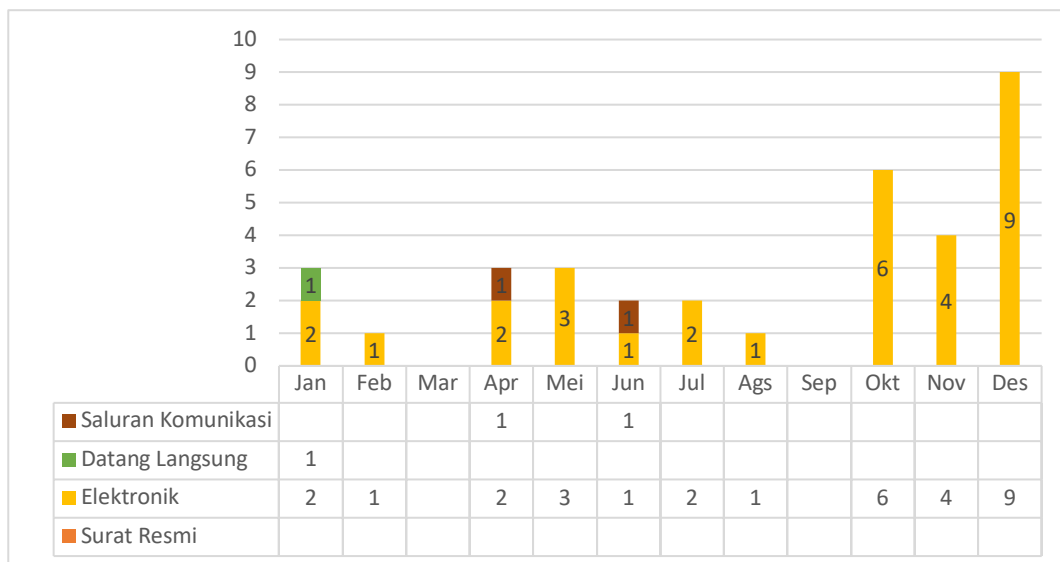
Grafik 1. Jumlah Pemohon Informasi per Bulan Tahun 2020



Mekanisme permohonan informasi pada 2020 mengalami perubahan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya diketahui jumlah pemohon informasi yang datang secara langsung terus berkurang, karena kemudahan permohonan informasi secara daring dan elektronik. Adanya pembatasan sosial selama pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan angka pemohon informasi secara signifikan, yaitu hanya 1 pemohon yang datang secara langsung Ke PPID Kementerian PPN/Bappenas.

Selain datang secara langsung, mekanisme permohonan informasi dilakukan melalui elektronik dengan jumlah 30 permohonan, melalui surat resmi sebanyak 1 permohonan dan melalui saluran komunikasi Whatsapp PPID sebanyak 2 permohonan. Penggunaan Whatsapp PPID menjadi sarana mitigasi selama Pandemi Covid-19, agar pemohon informasi tetap berjalan efektif dan efisien. Saluran komunikasi Whatsapp PPID dengan Nomor 081211002143 diharapkan dapat menjembatani pertanyaan secara langsung dari pemohon, sekaligus menjembatani pemohon informasi kepada pejabat pengelola PPID di unit kerja terkait (UKE II). Saluran komunikasi Whatsapp PPID juga dimanfaatkan sebagai upaya pengendalian adanya pemohon informasi yang tidak menyertakan kelengkapan administrasi sesuai SOP permohonan informasi publik.

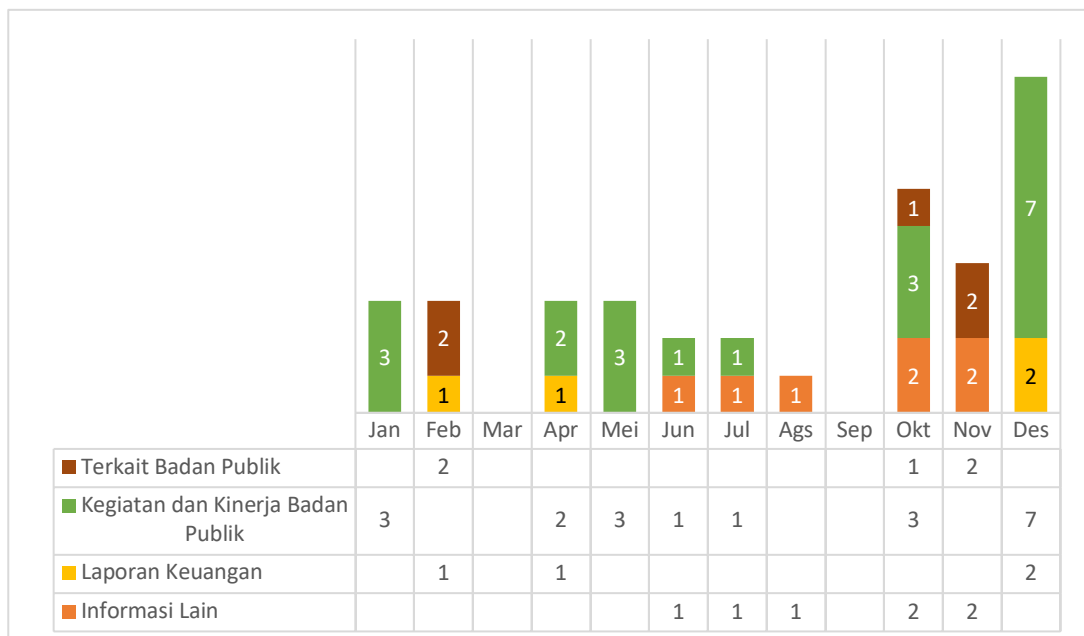
Grafik 2. Mekanisme Permohonan Informasi per Bulan Tahun 2020



Data yang diproses dan diberikan kepada pemohon selama kurun waktu 2020 dikategorikan menjadi beberapa kriteria. Pertama, informasi yang diberikan keseluruhan, dengan jumlah 20 informasi/dokumentasi. Kedua, diberikan sebagian dengan jumlah 7 informasi/dokumentasi. Informasi/dokumentasi yang hanya diberikan sebagian karena informasi dan data yang dimiliki memang hanya sebagian, selebihnya tidak ada dan/atau berada di

badan publik lain. Ketiga, dikecualikan dengan jumlah 2 informasi/dokumentasi yang dikecualikan. Keempat, tidak dapat diberikan/ditolak dengan jumlah 3 informasi/dokumentasi karena tidak dikuasai PPID. Permohonan informasi ditolak sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

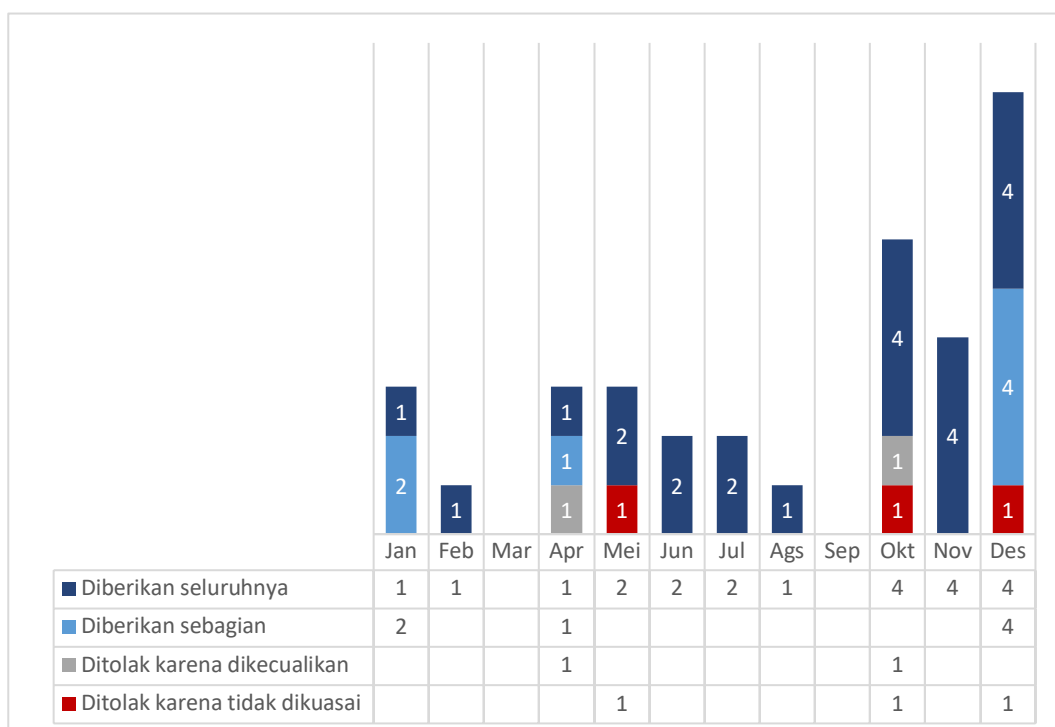
Grafik 3. Jenis Informasi Yang Diminta per Bulan Tahun 2020



Permohonan informasi ditolak/tidak diberikan tidak membuat capaian pemenuhan permohonan informasi dan dokumentasi publik menjadi negatif. Secara peraturan dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik memiliki dasar hukum yang mengatur jenis dokumentasi yang boleh dan tidak boleh diberikan. Sebagai “Badan Publik”, Kementerian PPN/Bappenas tentunya memiliki dasar pertimbangan yang cukup kuat dalam memberikan informasi, di antaranya apakah informasi yang dikecualikan, apakah informasi yang diminta tidak terdapat dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian PPN/Bappenas, atau apakah termasuk jenis informasi yang membahayakan keamanan bangsa atau tidak.

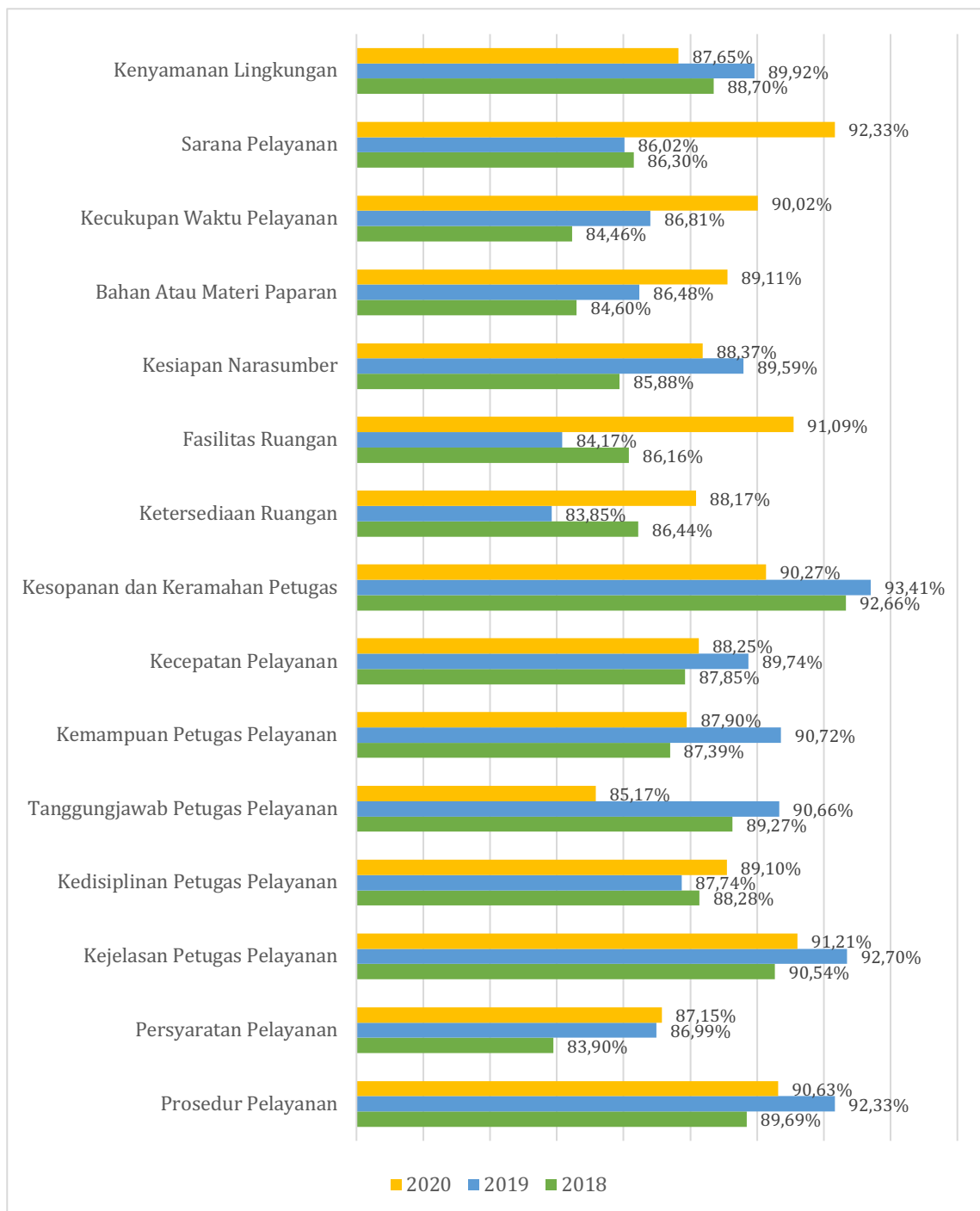
Hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 25 November 2020, Kementerian PPN/Bappenas memperoleh predikat Cukup Informatif. Capaian ini menunjukkan konsistensi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Hasil capaian juga menjadi pendorong untuk terus berupaya mengembangkan inovasi pelayanan publik. Berikut gambaran rinci dalam bentuk grafik pelayanan permohonan per bulan.

Grafik 4. Pelayanan Permohonan per Bulan Tahun 2020



Dalam memberikan layanan informasi publik, Sekretariat PPID Kementerian PPN/Bappenas dibantu PIC PID dari tiap UKE II Kementerian PPN/Bappenas utamanya dalam memberikan informasi yang menyangkut substansi unit kerja yang ditangani. Dengan pelayanan yang optimal dan sinergis tersebut, diperoleh Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik 2020 sebesar 89,30 persen yang meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2019 sebesar 88,74 persen.

Grafik 5. Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Tahun 2020



Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan informasi dan dokumentasi dari 2018 hingga 2020 dapat dikatakan stabil dalam predikat “Baik”. Hal ini sesuai indikator tingkat kepuasan Biro Humas dan Tata Usaha

Pimpinan dimana 90-100% adalah masuk dalam katagori “Sangat Baik”; 80-89% adalah masuk dalam katagori “Baik”; 70-79% adalah masuk dalam katagori “Sedang”; 60-69% adalah masuk dalam katagori “Buruk”; dan < 60% adalah masuk dalam katagori “Sangat Buruk”. Berikut gambaran rinci grafik kepuasan publik atas pelayanan PPID selama Tahun 2020 dibandingkan dengan 2018 dan 2019.

Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

No	Nama Pemohon	Tanggal	Informasi Yang Diminta	Tujuan	Waktu Proses
1.	H. M. Cholis Hasori	06-Jan-20	Evaluasi Implementasi PKH Dalam Meningkatkan Managemen Akses Layanan pada Pendidikan Dasar	Penyusunan Disertasi	Selesai (10 hari) oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan sosial
2.	Christin Natalia	07-Jan-20	Matriks Rencana Aksi Dukungan atas Pembangunan Kesehatan Tahun 2019	Kebutuhan Instansi	Selesai (2 hari) oleh Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
3.	Kantor Perwakilan Taiwan di Jakarta (Taipei Economic and Trade Office/ TETO)	15-Jan-20	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024” (full) 2. 7 Agenda Pembangunan Utama 3. Versi Bahasa English (jika ada)	Kebutuhan Instansi	Selesai (1 hari) oleh Sekretariat PPID
4.	Tomi Subhan	10-Feb-20	Rincian APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020	Untuk Bahan Kajian	Selesai (7 hari) oleh Direktorat Otonomi Daerah
5.	Archi Aditya	09-Apr-20	Detail Perencanaan Data Moneter atau Skema Pembiayaan Proyek dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru pada Tahap Awal 2021-2024	Penyusunan Tesis	Selesai (8 hari) oleh Sekretariat Pemindahan IKN, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman
6.	Julian Savero Putra S.	13-Apr-20	Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Transportasi Publik Perkotaan di Jabodetabek Tahun 2018-2019	Penyusunan Skripsi	Selesai (3 hari) oleh Direktorat Transportasi
7.	Epson Prasetyo	13-Apr-20	Dampak Ekonomi Asian Games terhadap Perekonomian	Penyusunan Skripsi	Selesai (3 hari) oleh Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
8.	Shahita Kurniady	06-Mei-20	SHP (Shapefile) / Peta Analog Jaringan Pipa Air Bersih di Kabupaten Bekasi	Penyusunan Skripsi	Selesai (7 hari) oleh Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman
9.	P. Tri Agung Kristanto	27-Mei-20	Materi, Data, dan Kerangka Waktu Pemindahan Ibukota	Liputan Wartawan	Selesai (7 hari) oleh Sekretariat

			Negara Sebelum dan Setelah Covid-19		Pemindahan IKN, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman
10.	Benny Matriksa	28-Mei-20	Keputusan Menteri PPN/Bappenas No. 44 Tahun 2020 tentang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020	Untuk Bahan Kajian	Selesai (1 hari) oleh Sekretariat PPID
11.	Kementerian Luar Negeri an. Hendro Retno Wulan	05-Jun-20	SOP Flexible Working	Kebutuhan Instansi	Selesai (5 hari) oleh Biro Sumber Daya Manusia
12.	Ridha Annisya	24-Jun-20	Permohonan Informasi Magang	Informasi Magang	Selesai (1 hari) oleh Biro Sumber Daya Manusia
13.	Flora Aninditya	07-Jul-20	1. Daftar program teknis/kegiatan terkait UMKM dan Koperasi yang dikelola oleh masing-masing K/L. 2. Jumlah anggaran dan penerima manfaatnya untuk masing-masing program teknis/kegiatan tahun 2019-2020	Untuk Bahan Kajian	Selesai (3 hari) oleh Direktorat Pengembangan Koperasi dan UKM
14.	Vyanca Rama Chezar	09-Jul-20	Permohonan Informasi Magang	Informasi Magang	Selesai (1 hari) oleh Biro Sumber Daya Manusia
15.	Dewi Anggraini	06-Agu-20	Permohonan Informasi Magang	Informasi Magang	Selesai (3 hari) oleh Biro Sumber Daya Manusia
16.	Yusrina Sabila	12-Okt-20	Permohonan Informasi Magang	Informasi Magang	Selesai (1 hari) oleh Biro Sumber Daya Manusia
17.	ANRI an. Dea Irene	12-Okt-20	Formulasi penyusunan formasi atau analisis beban kerja Jabatan Fungsional Perencana	Kebutuhan Instansi	Selesai (1 hari) oleh Pusbindiklatren
18.	Yuliana Rachmah	12-Okt-20	1. Program Keluarga Harapan 2. Kartu Sembako 3. Bantuan Sosial Tunai 4. Bantuan Subsidi Upah	Keperluan Individu	Selesai (7 hari) oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
18.	Adhina Nur Faeratina	15-Okt-20	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian PPN/Bappenas	Penyusunan Skripsi	Selesai (5 hari) oleh Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
19.	Nusserwan Talati (Asian Development Bank)	19-Okt-20	Mengkonfirmasi pengalaman H. Alwy sebagai Tenaga Ahli Kebijakan Publik di Bogor dari 1 September 2005-1 Desember 2005	Kebutuhan Instansi	Selesai (7 hari) oleh Biro Hukum
20.	Hendrian Deddy Aribowo	27-Okt-20	Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.84/M.PPN/HK/10/2020 Tentang Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik	Keperluan Individu	Selesai (2 hari) oleh Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan

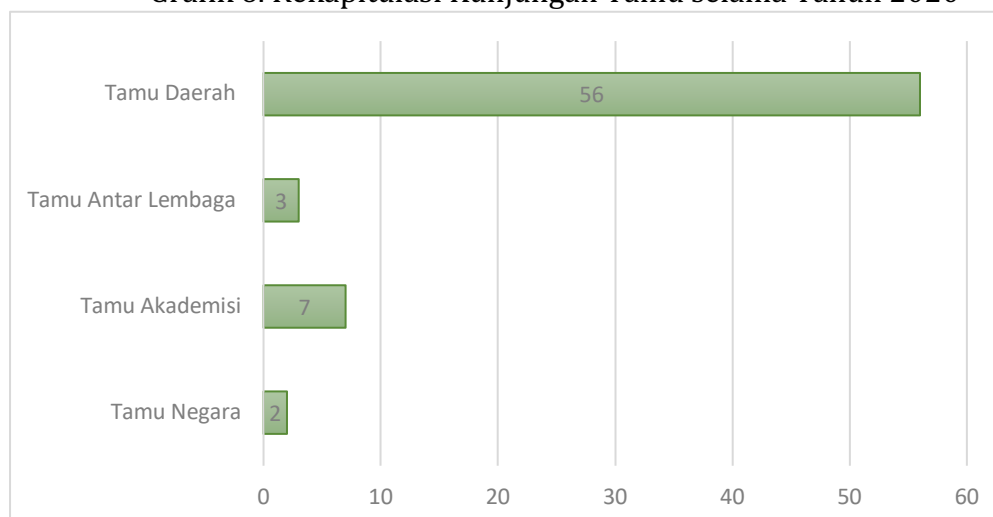
			Indonesia, dan Badan Intelijen Negara		
21.	Rd. Muh. Alfian Hardjadinigrat	03-Nov-20	Pengusulan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Perencana untuk mendapatkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Kebutuhan Instansi	Selesai (1 hari) oleh Pusbindiklatren
22.	Grenald Joshua Chris	04-Nov-20	1. Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Seluruh Indonesia Tahun 2016-2019 2. Rekapitulasi Penilaian terhadap Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2016-2019 3. Beberapa data lain terkait evaluasi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia	Untuk Bahan Kajian	Selesai (7 hari) oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
23.	Gugum Gumilar	09-Nov-20	Replikasi Aplikasi Forum Komunikasi Publik Bappeda Kabupaten Garut	Kebutuhan Instansi	Selesai (7 hari) oleh Pusdatinrenbang
24.	ANRI an. Dea Irene	23-Nov-20	Peta jabatan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas	Kebutuhan Instansi	Selesai (5 hari) oleh Biro Sumber Daya Manusia
25.	Lufta Erwin Winata	01-Des-20	1. Data Persiapan Proyek Jalan Tol KPBU 2. Resume Feasibility Proyek Jalan Tol KPBU 3. Data Financial Readiness Proyek Jalan Tol KPBU saat pengajuan Proposal 4. Resume proposak Solicited dan Unsolicited Proyek Jalan Tol KPBU	Untuk Bahan Kajian	Selesai (5 hari) oleh Biro Sumber Daya Manusia
26.	Iwan Ari Kurnia	02-Des-20	Permohonan daftar harga pembebasan/pembayaran lahan tanah di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah untuk Ibu Kota Negara (IKN)	Keperluan Individu	Selesai (1 hari) oleh Direktorat Pembangunan Daerah/IKN
27.	R. A. Endah Purnamasari	03-Des-20	"Kepentingan Indonesia melalui bantuan luar negeri ke Fiji dalam program Kerjasama Selatan Selatan Tahun 2015-2017"	Untuk Bahan Kajian	Selesai (2 hari) oleh Biro Sumber Daya Manusia
28.	Daffa Hadyansha	04-Des-20	Akses buku fisik <i>Public Private Partnership 2020</i>	Untuk Bahan Kajian	Selesai (2 hari) oleh Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
29.	Jhoni Heryanto Sitompul	09-Des-20	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah per Komponen Jenjang SMA Negeri se Kota Tanjungbalai Tahun 2020	Keperluan Individu	Selesai (4 hari) oleh Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
30.	Andi Eka Iftitah	07-Des-20	Nilai Skor Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2018 di Tingkat Desa (Skor Desa)	Untuk Bahan Kajian	Selesai 7 Hari Oleh Direktorat regional I
31.	Sawun Akbarudin	14-Des-20	Informasi mengenai surat balasan permohonan	Keperluan Individu	Selesai 9 Hari Oleh Biro SDM

			penelitian untuk program Doktor		
32.	Tyas Tri Pratiwi	15-Des-20	Pemetaan Rencana Kerja Sama antara Pemerintah-Swasta-Masyarakat (Public-Private-People Partnership) dalam Penanganan Covid-19	Untuk Bahan Kajian	Selesai 7 Hari Oleh Direktorat pengembangan pendanaan pembangunan dan direktorat kesehatan
33.	Liya Sundari	21- Des -20	1) Memorendum Of Understanding (MoU) Climate Change Program Loan Kerjasama Indonesia – JICA 2008-2010 2) Letter Of Intent kerjasama Indonesia dan Japan International Cooperation dalam program Climate Change Program Loan (CCPL) 3) Berita Serah Acara dari pelaksanaan program CCPL 4) Atau dokumen resmi lainnya mengenai program tersebut.	Penulisan Skripsi	Selesai 7 Hari Oleh Direktorat lingkungan hidup

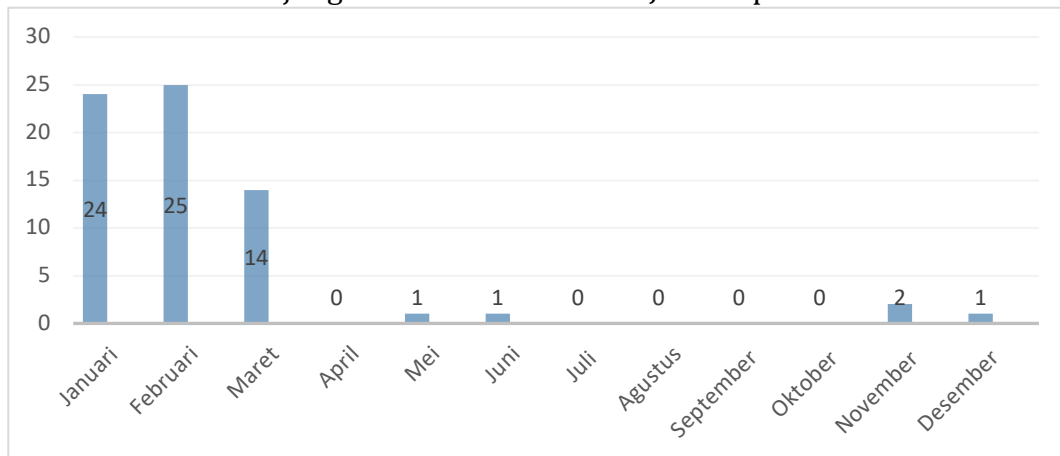
2.2 Kunjungan Tamu

Kegiatan meliputi fasilitasi kunjungan tamu, baik tamu negara, tamu daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun akademisi. Dari Januari hingga Desember 2020, tercatat Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan telah memfasilitasi penerimaan kunjungan sebanyak 68 kali, dengan rincian: (1) Tamu Negara sebanyak 2 kali kunjungan; (2) Tamu Daerah sebanyak 56 kali kunjungan; (3) Tamu Akademisi sebanyak 7 kali kunjungan; dan Antar Lembaga 3 kali kunjungan.

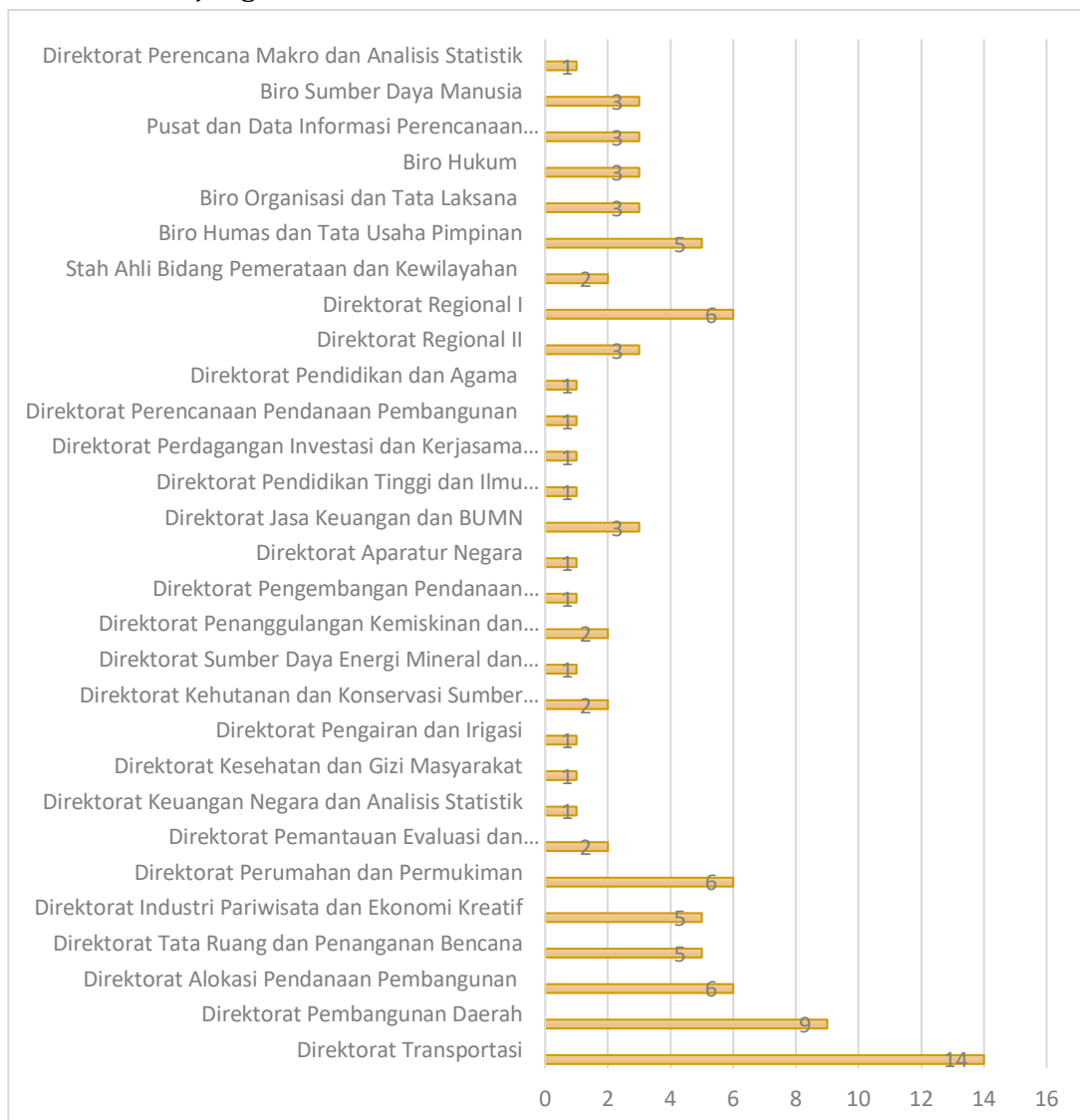
Grafik 6. Rekapitulasi Kunjungan Tamu selama Tahun 2020



Grafik 7. Kunjungan Tamu berdasarkan Jumlah per Bulan Tahun 2020



Grafik 8. Kunjungan Tamu DPRD berdasarkan UKE II Penerima Tahun 2020



Tabel 3. Kunjungan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020

No.	Delegasi	Tanggal	Tujuan	Ruang Rapat	Unit Kerja
1.	DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 Januari	Usulan Jembatan Sumatera-Bangka dan trans pulau bangka dan pulau Belitung dalam mendukung Pro-PN Pembangunan Jalan mendukung kawasan Prioritas (Kawasan Strategis pariwisata nasional)	Ruang Rapat 203	Direktorat Transportasi
2.	DPRD Kabupaten Seluma	8 Januari	Dana DAK Tahun 2020	Ruang Rapat 203	Direktorat Pembangunan Daerah
3.	DPRD Kabupaten Sanggau	9 Januari	Program Pembangunan nasional di Kabupaten Sanggau yang bersumber dari Dana APBN TA 2020	Ruang Rapat 203	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
4.	DPRD Kabupaten Langkat	9 Januari	Dana DAK Tahun 2020	Ruang Rapat 203	Direktorat Pembangunan Daerah
5.	DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	9 Januari	Rencana Prioritas pembangunan di kab kutai kartanegara tahun anggaran 2020 dan tentang tata ruang kab kutai kartanegara	Ruang Rapat 204	Direktorat Regional II dan Informasi Publik dan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
6.	Pemerintah Kabupaten Malaka	13 Januari	Prosedur Pendanaan Pusat ke Daerah	Ruang Rapat 204	Direktorat Pembangunan Daerah
7.	DPRD Kabupaten Garut	14 Januari	Penamaan Wilayah Industri Penyamakan Kerajinan dan Pemasaran Produk Barang Kulit di Kab Garut	Ruang Rapat 204	Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8.	DPRD Kabupaten Madiun	17 Januari	Rencana Proyek pengembangan Jalur Ring Road lintas kota Madiun	Ruang Rapat 203	Direktorat Transportasi
9.	Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura	17 Januari	Ibu Kota negara	Ruang Rapat 204	Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman
10.	DPRD Kabupaten Indramayu	21 Januari	Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Online	Ruang Rapat Perpustakaan	Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
11.	DPRD Kabupaten Bangka Selatan	21 Januari	Program KISS	Ruang Rapat Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan	Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
12.	DPRD Kabupaten Pati	21 Januari	Dana DAK 2020	Ruang Rapat Perpustakaan	Direktorat Pembangunan Daerah

13.	DPRD Kota Palu	16 Januari	Hunian Satu atap (HUNTAP)	Ruang Rapat 204	Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Perdesaan
14.	DPRD Kabupaten Kota Baru	23 Januari	Pembangunan jembatan penghubung pulau kalimantan dan pulau laut	Ruang Rapat 203	Direktorat Transportasi
15.	DPRD Kabupaten Lampung Tengah	23 Januari	Tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Ruang Rapat Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan	Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
16.	DPRD Provinsi Kalimantan Timur	30 Januari	Alokasi Anggaran dan Kegiatan pada APBN 2020 untuk pembiayaan Ibu Kota Negara	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 3	Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman, Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Direktorat Alokasi Pendanaan dan Direktorat Pembangunan Daerah
17.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	30 Januari	Aplikasi Air minum dan menyehatkan lingkungan berbasis Rumah tangga (SABRT)	Ruang Rapat Sekretariat Perkotaan Perumahan dan Permukiman (Jln. Ki Mangunsanggoro No. 14)	Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman
18.	DPRD Kabupaten Garut	31 Januari	Pengembangan Industri dan Pariwisata di Kabupaten Garut	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 3	Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19.	DPRD Kabupaten Pidie Jaya	31 Januari	Penyelarasan RPJMD terhadap RPJMN	Ruang rapat Perpustakaan	Direktorat Regional I
20.	DPRD Kabupaten Karangasem	5 Februari	RPJMD	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Direktorat Regional I
21.	DPRD Provinsi Kalimantan Timur	3 Februari	Ibu Kota Negara	Ruang Rapat Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan	Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
22.	Bupati Kotawaringin Barat	5 Februari	Kawasan Industri Surya borneo dan infrastuktur pendukung jalan, bandara, serta pelabuhan kabupatem kotawaringin barat	Ruang Rapat 204	Direktorat Regional II
23.	DPRD Kabupaten Rokan Hulu	6 Februari	Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPPANDA)	Ruang Rapat Wisma Bakrie 2	Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24.	DPRD Kabupaten Bangka Barat	7 Februari	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Muntok Kab Bangka Barat	Ruang Rapat 203	Direktorat Transportasi

25.	DPRD Kabupaten Mojokerto	10 Februari	RPJMD	Ruang Rapat 203	Direktorat Regional I
26.	DPRD Kabupaten Batu Bara	10 Februari	APBN yang diperuntukan untuk Kab Batu bara	Ruang Rapat 203	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
27.	DPRD Provinsi Jawa Timur	11 Februari	Implementasi pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019	Ruang Rapat 203	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dan dan Direktorat Regional I
28.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Lingkungan Hidup	12 Februari	Masterplan Pemindahan Ibu Kota Negara	Ruang Rapat 203	Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman
29.	DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 Februari	RPJMD	Ruang Rapat 203	Direktorat Regional I
30.	DPRD Kabupaten Pelalawan	13 Februari	Pembangunan sarana jalan, jembatan dan drainase	Ruang Rapat SS 1-2	Direktorat Transportasi
31.	DPRD Bolang Mongondow (Kota Kotamobagu)	13 Februari	Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab Belitung Timur	Ruang Rapat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
32.	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	13 Februari	Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab Belitung Timur	Ruang Rapat Wisma Bakrie 2 lt. 8	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
33.	DPRD Kabupaten Bojonegoro	14 Februari	Pembangunan Jalan Tol ngawi-Bojonegoro-tuban dan Gresik	Ruang Rapat 203	Direktorat Transportasi
34.	DPRD Kota Cilegon	14 Februari	Rencana Tata Ruang Cilegon	Ruang Rapat SS 1-2	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon
35.	DPRD Kota Bandung	18 Februari	Raperda Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung	Ruang Rapat 203	Direktorat Tata Ruang dan Prtanahan dan Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman
36.	DPRD Kota Pangkal Pinang	20 Februari	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat Wisma Bakrie 2 lt. 8	Direktorat Pembangunan Daerah
37.	DPRD Kabupaten Tanah Datar	20 Februari	Rencana kerja Pemerintah tahun 2021	Ruang Rapat Utama 2	Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
38.	DPRD Kabupaten Rokan Hulu	20 Februari	Program Pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu	Ruang Rapat Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan

39.	DPRD Kabupaten Sijunjung	21 Februari	RPJMD	Ruang Rapat Utama 2	Direktorat Regional I
40.	DPRD Kabupaten Bone Bolaango	27 Februari	Perencanaan Pembangunan Daerah Gorontalo	Ruang Rapat Utama 2	Direktorat Regional II ,Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber daya Air, Direktorat Pembangunan Daerah, Direktorat Transportasi, Direktorat Pengairan dan Irigasi
41.	DPRD Kabupaten Lampung Timur	27 Februari	Program pembangunan di Kabupaten Lampung Mengenai Jalan dan Jembatan	Ruang Rapat Utama 2	Direktorat Transportasi
42.	DPRD Kota Banjar	27 Februari	Rencana Pembangunan Jalan Tol Bandung Cilacap	Ruang Rapat Utama 2	Direktorat Transportasi
43.	Pemerintah Seram Bagian Timur	2 Maret	Percepatan Pembangunan Infrastuktur Ibu Kota Deventif	Ruang Rapat 203	Direktorat Transportasi
44.	DPRD Kota Sawah Lunto	3 Maret	Program Word Heritage dan Pembangunan Jalan	Ruang Rapat Proklamasi	Direktorat Energi Mineral dan Pertambangan dan Direkrat Transportasi
45.	DPRD Kota Bandung	3 Maret	Penanggulangan Kemiskinan	Ruang Rapat Wisma Bakrie lt. 7	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
46.	DPRD Kabupaten Balangan	5 Maret	Dana Alokasi Khusus	Ruang Biro Humas dan Tatat Usaha Pimpinan	Biro Humas dan Tatat Usaha Pimpinan
47.	DPRD Kabupaten Balangan	5 Maret	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat 203	Direktorat Pembangunan Daerah
48.	DPRD Provinsi Bengkulu	5 Maret	Dana Alokasi Khusus	Ruang Rapat 203	Direktorat Pembangunan Daerah
49.	DPRD Kabupaten Banyuasin	5 Maret	Pembangunan Pelebaran jalan Palembang Betung melalui DAK di Kabupaten Banyuasin	Ruang Rapat 203	Direktorat Transoprtasi
50.	DPRD Provinsi Riau	6 Maret	Peningkatan Alokasi Dana Pusat ke Provinsi Riau	Ruang Rapat Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
51.	DPRD Kabupaten Paser	6 Maret	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten	Ruang Rapat 204	Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

52.	DPRD Kabupaten Belitung Timur	6 Maret	Penyusunan Dokumen RKPD, KUA, PPAS	Ruang Rapat 203	Direktorat Pembangunan Daerah
53.	DPRD Kabupaten Rokan Hilir	13 Maret	Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) terkait penerangan Jalan	Ruang Rapat Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
54.	DPRD Kabupaten Semarang	13 Maret	Peran Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penguatan Industri Pariwisata	Ruang Rapat 203	Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
55.	DPRD Kabupaten Langkat	13 Maret	penyusunan rencana pembangunan tahun anggaran 2021 serta rencana pembangunan jalan tol dan jaringan kereta api di wilayah kabupaten langkat	Ruang Rapat 204	Direktorat Transprtasi
56.	Bupati Jayapura	4 Desember	Penyampaian Program yang mendukung Inpres Nomor 9 Tahun 2020	Ruang Rapat Sekertaris Menteri,Wisma Bakrie Lt. 17	Sahli Pemerataan Kewilayahan dan Desk Papua

Tabel 4. Kunjungan Tamu Negara Asing Tahun 2020

No.	Delegasi	Tanggal	Tujuan	Ruang Rapat	Unit Kerja
1.	Training and Technology Transfer (TTT) Ministry of Finance Government of Bangladesh	28 Januari	Innovation, Annual Performance Agreement (APA) and Sustainable Development Goal (SDGs)	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan dan Sekretariat SDGs
2.	Emmbassy of Japan	5 Februari	The Mission is intend to share japan's experience and know how on building a new city as well to collect information on the relocation of new capital	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 5	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Direktur Kerasama Pendanaan Bilateral, Direktorat Makro dan Analisis Statistik, Sekretariat SDGs

Tabel 5. Kunjungan Tamu Akademisi/Universitas Tahun 2020

No.	Instansi	Tanggal	Tujuan	Ruang Rapat	Unit Kerja
1.	Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ekonomi dan Bisnis	14 Januari	Potensi perbankan syariah dalam pertumbuhan	Ruang Rapat SS 1-2	Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN dan KNKS
2.	Universitas Matlaul An'war	14 Januari	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Banten 2020	Ruang Rapat SS 1-2	Direktorat Transportasi

3.	Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ekonomi dan Bisnis	15 Januari	Inovasi sistem keuangan di era digital	Ruang rapat Proklamasi	Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN dan KNKS
4.	Universitas Raden Intan	21 Januari	perencanaan invetasi dan pengembangan pendanaan pembangunan	Ruang Rapat SS 4	Direktorat Perdagangan Investasi dan Kejasama Ekonomi Internasional dan Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
5.	SMA Insantama Bogor	26 Februari	Latihan Kepemimpinan dan Management Tingkat Akhir	Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 4	Direktorat Pendidikan Tinggi IPTEK dan Kebudayaan
6.	Universitas Darussalam Gontor Universitas Matingan	6 Maret	Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pembangunan Indonesia	Ruang rapat Proklamasi	Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN dan Direktorat Pendidikan dan Agama
7.	Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Administrasi	20 November	Kebijakan Publik	Zoom Meeting	Direktorat Aparatur Negara

Tabel 6. Kunjungan Tamu Antar Lembaga Tahun 2020

No.	Instansi	Tanggal	Tujuan	Ruang Rapat	Unit Kerja
1	Kementerian Luar Negeri	29 Mei	Benchmarking Integrated Digital Work Place Teknologi Sharing Cloud dengan Bappenas	Zoom Meeting	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Biro Organisasi dan Tata Laksana , Biro Sumber Daya Manusia
2	Kementerian Luar Negeri	17 Juni	Integrated Digital Work Place	Zoom Meeting	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Biro Organisasi dan Tata Laksana , Biro Sumber Daya Manusia
3	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	11 November	Naskah Dinas Elektronik	Zoom Meeting	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Biro Huku,

2.3 Badan Koordinasi Humas (BAKOHUMAS)

Terhitung mulai Januari hingga Desember 2020, Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan telah mengikuti sebanyak 8 Forum pertemuan berkala Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang diselenggarakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga Pusat. Diharapkan pertemuan tersebut dapat meningkatkan kerja sama unit kehumasan pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang

kehumasan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kehumasan. Namun seperti tahun sebelumnya, pada 2020 Kementerian PPN/Bappenas tidak menyelenggarakan forum pertemuan Bakohumas.

Tabel 7. Pertemuan Bakohumas yang Dihadiri selama Tahun 2020

No.	Instansi	Tanggal	Tema	Tempat
1.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	14 Juli	Seru Belajar Kebiasaan Baru	Zoom Meeting
2.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	20-21 Juli	Kesiapan Sektor teknologi informasi dan Komunikasi TIK	Zoom Meeting
3.	Kementerian Luar Negeri	10 Agustus	<i>The New everyday Digital Life : Oportunity and Challenges</i>	Zoom Meeting
4.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	18 September	Pentingnya Informasi Benar di masa pandemi "Informasi Benar, Rakyat Pintar"	Zoom Meeting
5.	Badan Inteligent Negara	26 Oktober	Strategi Komunikasi Publik Pasca Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja	Zoom Meeting
6.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Desember	Panduan dan Sertifikasi Clean, Health, Safety dan Environment (CHSE) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Zoom Meeting
7.	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	2 Desember	Membumikan Inovasi Vaksin Merah Putih Covid-19	Zoom Meeting
8.	Komisi Informasi Pusat	21 Desember	Literasi Vaksin Covid-19	Zoom Meeting

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik atau *Public Service* Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan yang baik berdampak positif terhadap kelancaran seluruh kegiatan.
2. Staf pelaksana yang saling mendukung dan berkeinginan kuat untuk belajar, menyokong satu sama lain apabila ada kegiatan yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan.
3. Adanya *Person in Charge* Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PIC PID) dari UKE II yang menguasai informasi sektoral, semakin mempercepat pelayanan informasi publik.
4. Hubungan baik dengan *stakeholders* utamanya humas Kementerian/Lembaga dan Bakohumas membuat koordinasi menjadi lebih efektif.
5. Dalam mendukung pelayanan kunjungan tamu dan pemohon informasi publik agar dapat terselenggara dengan baik dimasa pandemi Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan dapat memfasilitasi secara *online*.
6. Mengoptimalkan saluran komunikasi resmi kunjungan tamu dan Pelayanan informasi publik dalam rangka koordinasi pelaksanaan kunjungan tamu dan pelayanan informasi dan data di Kementerian PPN/Bappenas.
7. Keluaran kegiatan diarsipkan dengan baik dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

3.2 Faktor Penghambat

1. Kunjungan tamu yang pada umumnya dilakukan mendadak menghambat pelayanan secara optimal, utamanya terkait ketersediaan narasumber.
2. Pelaksanaan kunjungan tamu dan PPID terkendala Covid-19.

BAB IV PENUTUP

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2020 ini dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan berhasil memberikan pelayanan prima. Hal ini didasarkan pada oleh data survei tingkat kepuasan pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas meningkat menjadi 89,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 88,74 persen. Seluruh permohonan informasi publik dan kunjungan tamu juga dapat dilayani oleh Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan dengan baik.

Tuntutan pelaksanaan *good governance* di era keterbukaan informasi yang dengan mudah dan cepat mendapat layanan informasi yang akurat memacu Kementerian PPN/Bappenas untuk selalu dapat menjalankan tupoksi dengan baik dan selalu berinovasi untuk mengembangkan layanan informasi. Tahun 2020, PPID Kementerian PPN/Bappenas memutakhirkan konten di laman www.bappenas.go.id dan ppid.bappenas.go.id, baik informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Upaya dan langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan agar pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di tahun berikutnya dapat semakin berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas Kementerian PPN/Bappenas di mata masyarakat luas. Perbaikan ke depan yang diharapkan, antara lain: kembali merekrut staf bidang PPID agar dapat menunjang keluaran pelayanan informasi publik, kembali mensosialisasikan *Standard Operating Procedure* (SOP) kepada para *stakeholders* terkait, mengusulkan kepada Biro Umum untuk menyediakan ruang rapat tetap untuk kegiatan pelayanan kunjungan tamu, untuk mengantisipasi kunjungan mendadak, dan mengadakan pertemuan rutin dengan PIC PID dari masing-masing UKE II secara berkala.

LAPORAN KOORDINASI
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
2020

BIRO HUMAS & TATA USAHA PIMPINAN

